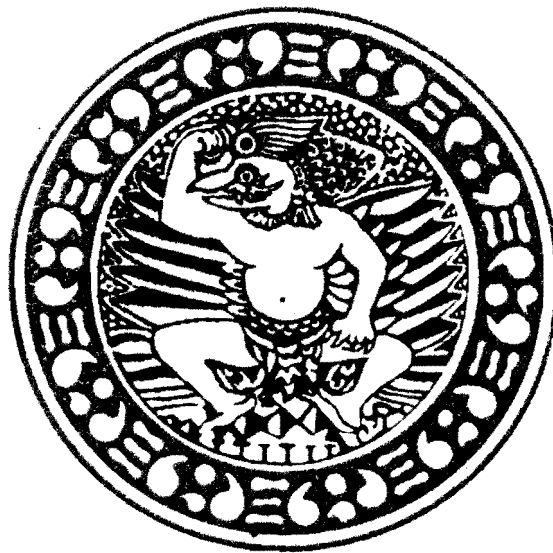


MEMO HUKUM

SYARIEF UTOYO

PERAMPASAN HAK ATAS TANAH

(STUDI KASUS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH
BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
NO. 14/PID.B/1995/PN.BONDOWOSO)



KK.
Pid. 700/96.
Uto
P.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

PERAMPASAN HAK ATAS TANAH

(STUDI KASUS PERAMPASAN HAK ATAS TANAH
BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
NO. 14/PID.B/1995/PN.BONDOWOSO)



KK.
Lid. 710/196.
Wdb
P

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

Mochamad Zaidun, S.H.

NIP. 130 517 145

Penulis,

Syarief Utoyo

NIM. 039 213 486

Diuji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juli 1996

Panitia Penguji :

1. Ketua : Woerjaningsih, S.H., MS.

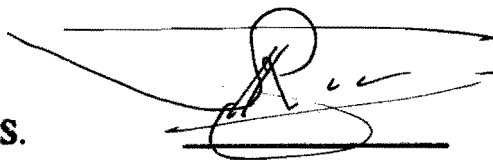


2. Sekretaris : Tilly A.A. Rampen, S.H., MS.



3. Anggota : Mochamad Zaidun, S.H.

Sampe Randa Tumanam, S.H., MS.



Made Darma Weda, S.H., MS.



V. Kesimpulan :

1. Untuk penyelesaian kasus pidana yang didalamnya terkandung unsur hukum perdata mengenai kepemilikan maka unsur hukum perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dulu.
2. Penggunaan pasal 368 ayat(1) lebih tepat dari pada pasal 335 ayat(1) untuk kasus perampasan hak atas tanah di atas.

VI. Saran :

1. Majelis Hakim pada sidang kasus pidana perampasan hak atas tanah seharusnya mengingatkan kepada pihak korban untuk menggunakan jalur hukum perdata dengan mengingat akan yurisprudensi M.A. No. 279 K/Sip/1957.
2. Dalam menggunakan pasal-pasal dalam KUHP Penuntut Umum hendaknya mempertimbangkan akan tujuan pemidanaan untuk mencegah timbulnya perbuatan pidana itu sendiri.